

Strategi Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Pendekatan Smart City di Kabupaten Maros

Muhammad Nurjaya^{1*}, Mustafa², Bohari³

¹ Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; nurjaya@umma.ac.id

² Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; musresfas@gmail.com

³ Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; bohari@umma.ac.id

Penulis korespondensi: nurjaya@umma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji terkait strategi meningkatkan daya saing daerah dengan pendekatan *Smart City* di Kabupaten Maros disusun oleh Muhammad Nurjaya, Mustafa dan Bohari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan Metode pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif dilakukan dengan menelaah data primer sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)*, *public hearing*, kunjungan kerja, dankonsultasi ke instansi terkait bersama para pemangku kepentingan terutama yang menyangkut dalam hal inplementasi *Smart City* di Kabupaten Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan strategi meningkatkan daya saing daerah dengan pendekatan *Smart City* di Kabupaten Maros yaitu dengan tata kelola birokrasi yang efisien dan efektif (*Smart Governance*), permukiman penduduk yang layak dan terjangkau oleh semua kalangan (*Smart Living*), lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat (*Smart Society*), pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan dan pengembangan ekonomi dengan pemberdayaan UMKM (*Smart Economy*), citra kota/daerah dengan berbagai kelebihan dari aspek pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Maros (*Smart Branding*), dan pemeliharaan lingkungan berbasis masyarakat dengan semangat gotong royong (*Smart Environment*).

Kata Kunci: *Strategi Smart City, Daya Saing Daerah*

Abstract

This research examines strategies to increase regional competitiveness using the Smart City approach in Maros Regency prepared by Muhammad Nurjaya, Mustafa and Bohari. The research method used is qualitative with an Empirical Juridical and Normative Juridical approach method carried out by examining primary data as support and to confirm secondary data obtained by holding Focus Group Discussions (FGD), public hearings, work visits, and consultations with relevant agencies with the stakeholders, especially those related to the implementation of Smart City in Maros Regency. The research results show that the regional government has implemented a strategy to increase regional competitiveness with the Smart City approach in Maros Regency, namely with bureaucratic governance (Smart Governance),

residential areas (Smart Living), community environment (Smart Society), economic growth (Smart Economy), city/region image (Smart Branding), and environmental maintenance (Smart Environment).

Keywords: *Smart City Strategy, Regional Competitiveness*

PENDAHULUAN

Era global dalam perkembangan teknologi menuntut kota-kota di seluruh dunia menjadi produktif, inovatif, dan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi masa depan. Dalam rangka menindaklanjuti dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada perkotaan, maka muncul sebuah konsep pembangunan *Smart City* (kota cerdas) dengan optimalisasi teknologi.

Teknologi mendesain sesuatu untuk digunakan senyaman mungkin dimana barang-barang tersebut terus mengalami perubahan dari masa ke masa dengan tujuan mencapai kata penggunaan yang praktis dan dinamis (Bahtiar, 2018). Untuk itu, sebagai wujud adaptasi dan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, menciptakan kehidupan yang lebih nyaman, aman dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan serta berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Maros melakukan pembangunan pada dengan pendekatan program *smart city*.

Smart city merupakan sebuah kerangka masa depan yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan dan tantangan perkotaan. Kerangka *smart city* dilakukan dengan melakukan integrasi infrastruktur jaringan ke aplikasi cerdas yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki pada tiap daerah.

Tujuan utama *smart city* adalah untuk mengoptimalkan fungsi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga dengan menggunakan teknologi pintar dan analisis data. Optimalisasi teknologi bertujuan untuk membuka informasi secara optimal yang saling berhubungan yang tersedia saat ini untuk lebih memahami dan mengontrol serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Tidak hanya karena kota memiliki dinamika perubahan yang begitu cepat, tetapi juga karena dalam banyak prediksi yang didasarkan pada hasilhasil penelitian bahwa hampir 50% penduduk dunia akan memadati kota (Senate Department for Urban Development and the Environment, 2015; Bakıcı, *et.al.*, 2013; Chourabi, *et.al.*, 2012).

Kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, sehingga warga kota merasakan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan tinggal di kotanya harus dipenuhi oleh pengelola kota (Neirottia, *et.all.*, 2014; Nam and Pardo, 2011; Washburn and Sindhu, 2010). *Smart city* sendiri pada intinya merupakan konsep pengelolaan kota yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar kota menjadi lebih cerdas dan efisien di dalam pemanfaatan berbagai sumberdaya yang ada, serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kehidupan masyarakat kota dengan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup. Keberadaanya kota terus berubah dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan serta membawa pengaruh yang besar dalam pola hidup dan peradaban manusia. Namun demikian, semakin cepat dan besar pertumbuhan sebuah kota, maka cenderung semakin besar pula masalah yang muncul terhadap kota tersebut.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan terhadap model-model pengembangan *smart city* dan juga mempertimbangan potensi dan permasalahan yang ditemukan di 3 kota *prototype*, maka didapat rekomendasi model *smart city* yang akan dikembangkan. Indikator untuk setiap komponen dalam beberapa model sebagai berikut;

Amsterdam mengembangkan *smart city* dengan 5 (lima) komponenn area pengembangan utama yaitu *Smart Lvin*, *Smart Working*, *Smart Mobiliti*, *Smart Public Facilities* dan *Smart Open Data*. Lyon merupakan salah satu kota di Perancis yang berhasil dengan baik dalam mengembangkan *smart city*. Konsep utama *smart city* Lyon terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu *Smart Environment*, *Network Of Actors*, *Participation* dan *New technologies*.

Seoul mengemukakan 3 (tiga) komponen utama dalam mengembangkan *smart city* yaitu *Smart User*, *Smart ICT Infrastruktur* dan *Smart City Management*. Dari hasil kajian tersebut menghasilkan rekomendasi Model *smart city* yang dikembangkan di Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) komponen utama yaitu: *Smart people* (masyarakat yang cerdas), *Smart Government* (pemerintah yang cerdas), *Smart Infrastructure*, (Infrastruktur TIK yang cerdas), *Smart Environment* (lingkungan yang cerdas), dan *Smart Mobility* (pergerakan yang cerdas).

Smart people dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan konsep *Smart City*. *Smart people* memiliki target agar masyarakat memiliki kemampuan dalam mengakses teknologi serta memiliki akses yang mudah terhadap teknologi. Secara khusus terkait dengan aspek penataan ruang, *smart people* bertujuan agar masyarakat mendapat kemudahan dalam memperoleh akses informasi terkait kegiatan penataan ruang, dan oleh karenanya sekaligus untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang.

Smart infrastructure adalah kota yang memiliki infrastruktur TIK yang baik (*ICT infrastructure*) dalam memaksimalkan potensi kota dan menyediakan layanan, data ataupun informasi terhadap masyarakat yang sudah berbasis komputerisasi dan teknologi informasi. *Smart infrastructure* dalam kaitannya dengan penataan ruang adalah bentuk-bentuk dukungan infrastruktur TIK dalam mensukseskan kegiatan penataan ruang. *Smart government* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang cerdas yang melakukan layanan terhadap masyarakat dengan cepat, mudah dan transparan melalui penggunaan teknologi yang baik. *Smart environment* merupakan terbentuknya kota dan lingkungan yang layak huni melalui berbagai fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan. Dalam aspek penataan ruang akan dilihat secara spesifik tentang *smart green waste*, *smart green water*, *smart green energy*. Selain itu akan dilihat pula bagaimana kegiatan penataan ruang yang berbasis TIK. *Smart mobility* merupakan bagian atau dimensi pada *smart city* yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas atau pergerakan masyarakat. Pada *smart mobility* ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang cerdas, sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalnya kemacetan, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain.

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo pada tahun 2017 telah membantu banyak daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya melalui pendekatan *smart city*. Dengan adanya pembangunan melalui pendekatan *Smart City*, maka akan terbentuk ruang inovasi tanpa batas untuk menyelesaikan berbagai persoalan, memenuhi kebutuhan, dan potensi daerah yang dimiliki oleh daerah dengan memanfaatkan teknologi sebagai faktor pendorong utama.

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal Kabupaten Maros maka dipandang perlu untuk melahirkan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan/pelaksanaan Program *Smart City* yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat semenjak tahun 2017. Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) akan memberikan arah yang jelas tentang bagaimana peran

seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan/pelaksanaan Program *Smart City* di Kabupaten Maros juga memperjelas komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Smart City

Perkembangan zaman dan diikuti perkembangan teknologi yang sangat canggih menuntut setiap negara untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam membangun negara dalam merencanakan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakatnya, termasuk negara Indonesia yang pada saat ini sedang dalam fase berkembang. Putu Eka Pratama (2014) mengatakan bahwa *Smart City* atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah perkotaan sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem di dalamnya.

Hizra Marisa (2023) Dalam Kehidupan di era modern masyarakat dituntut untuk mengikuti alur teknologi dan segala kehidupan tidak lepas dari teknologi, maka dari itu presiden mengeluarkan perpres No 95 tentang pembangunan pemerintah berbasis elektronik untuk menunjang kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendukung program pemerintah tersebut, maka dari itu munculah dengan istilah *Smart city*, Pembangunan dan pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) telah meluas di berbagai belahan dunia. Tidak ketinggalan perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) juga telah mulai membahas dengan usulan Singapura terkait pembentukan ASEAN *Smart City Network* (ASCN). Nukma (2016) mendefinisikan *smart city* sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

Menurut Suhono dalam Nukma: 2016 *smart city* merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. *Smart city* tersusun dari komponen-komponen dimensi pendukung yakni : *smart economy*, *smart people*, *smart governance*, *smart government*, *smart mobility*, *smart environment* dan *smart living*. *Smart city* juga dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep penataan kota yang terintegrasi dalam semua aspek, baik dari pemerintahan, penduduk, kesehatan, pendidikan dan masih banyak lagi yang lainnya dengan menjadikan perkembangan teknologi sebagai salah satu perangkatnya.

Mursalim (2017) *Smart City* merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. *Smart city* adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga *smart city* diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Sedangkan teknologi informasi komunikasi adalah istilah umum untuk semua jenis teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi komunikasi juga menyatukan komputasi (ilmu computer yang memecahkan sebuah masalah dari data input) dan

komunikasi yang berkecepatan tinggi untuk data, suara dan video. Caragliu, A. dalam Nukma (2016) mendefinisikan *smart city* sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Dijelaskan, bahwa *smart city* itu menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, untuk mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya, dan untuk terlibat lebih efektif dan aktif dengan warganya.

Kata kunci “pintar” juga meliputi transportasi, energi, kesehatan, air dan limbah. Tujuan dari adanya *smart city* untuk membentuk suatu kota yang aman, nyaman bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan dari *smart city* adalah untuk menunjang kota di dalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing) dan lingkungan (kenyamanan). Dengan konsep kota cerdas, pemerintah daerah didorong untuk melakukan inovasi dan pembaharuan khususnya untuk pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi. Pada intinya konsep *smart city* adalah bagaimana cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi dengan menggunakan teknologi yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota lebih efisien dan layak huni.

Indikator Smart City

Giffinger membagi dalam Pratama (2014). *Smart City* ke dalam enam indikator. Indikator tersebut meliputi:

1. *Smart economy*, merupakan salah satu pilar penopang kota atau negara. Pengelolaan ekonomi suatu daerah ataupun negara haruslah di data sebaik mungkin, untuk memudahkan hal itu setiap data perlu terkomputerisasi.
2. *Smart people*, merupakan tujuan utama yang harus dipenuhi di dalam mewujudkan *Smart City*.
3. *Smart Governance*, merupakan bagian pada *Smart City* yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. *Smart Governance* meliputi segala syarat, kriteria dan tujuan untuk proses pemberdayaan dan partisipasi dari masyarakat dan Pemerintah secara bersama-sama. Adanya kerjasama tersebut dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, jujur, adil, berdemokrasi dan kualitas serta kuantitas layanan publik yang baik.
4. *Smart mobility*, merupakan bagian pada *Smart City* yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Terdapat proses transportasi yang Smart, sehingga diharapkan tercipta layanan publik yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi.
5. *Smart environment*, merupakan bagian dari *Smart City* yang mengkhususkan kepada bagian penciptaan lingkungan yang pintar. Dalam hal ini perlu adanya beragam terapan aplikasi dalam bentuk sensor *network* atau *wireless sensor network*, jaringan komputer dan beragam teknologi lainya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri.
6. *Smart living*, merupakan bagian dari *Smart City* yang mengkhususkan pada proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar.

Daya Saing Daerah

Appe (2020) menyatakan bahwa daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu. *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan

perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. *Institute for Management Development* (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan *agresivitas*, *globality* dan *proximity*, serta model ekonomi dan sosial. dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap dapat membangun daya saing pemerintah daerah di Indonesia.

Kemampuan daerah untuk meningkatkan daya saingnya akan sangat tergantung pada kemampuan Daerah dalam menemukenali dan menentukan faktor-faktor pendorong daya saing dan juga kemampuan Daerah dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk dapat mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional (Ridwan *et al.*, 2018). Berbagai upaya sudah dilakukan beberapa daerah untuk meningkatkan daya saingnya, seperti yang ditulis oleh Wibowo (2017), yaitu melakukan Perancangan Branding Desa Wisata Kembang Arum untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Bidang Pariwisata.

Martin dan Tyler dalam Juma'in Appe (2020) menyebutkan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi:

1. untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta dan modal publik;
2. untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, enterpreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik;
3. untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor *input*, *output* dan *outcome* yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian.

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat *output* yang dihasilkan untuk setiap *input* yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah *input* fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, dalam Appe, 2020)

Jika pemerintah menginginkan daerahnya berdaya saing, maka program pembangunannya harus berasal dari pengembangan potensi ekonomi unggulannya (Putri & Rahayu, 2021). Ketika berbicara daya saing daerah, tentu tidak terlepas dari membahas sektor unggulan. Sektor unggulan merupakan kunci daerah dalam berdaya saing. Secara umum, dapat dikatakan bahwa daerah yang berdaya saing adalah daerah yang memiliki sektor unggulan (Swastuti & Pudjiarti, 2020). Daya saing daerah merupakan indikator pembangunan yang dapat ditempuh dengan inovasi, inovasi dalam prosesnya membutuhkan komitmen yang berbentuk kebijakan, hal inilah yang membedakan perkembangan pembangunan antar wilayah. (Prasetyo, 2020) membahas daya saing daerah tentu perlu merujuk pada daya saing internasional. Daya saing ekonomi lokal sendiri terbentuk karena peranan dan komitmen multiaktor di dalamnya yang membentuk suatu format kelembagaan lokal untuk menghilangkan hambatan birokratif bagi pengembangan industri/perusahaan- perusahaan lokal, memperbaiki kegagalan pasar, dan menciptakan keunggulan lokalitas dengan spesialisasi produk yang berciri khas/unik. Kekhasan

produksi suatu lokalitas dalam proses perkembangannya terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi kreatif di dalamnya (Swastuti & Pudjiarti, 2020).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Desain Penelitian

Lokasi apenelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dengan melibatkan beberapa unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Maros.

Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data-data sekunder dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan Pembangunan daerah. Data yang dipergunakan dalam kajian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Sifat Penelitian

Dalam kajian penelitian dengan menggunakan pendekatan gabungan/*mix methode*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Menurut Craswell (2010) penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Keunggulan dari penggunaan *mix method* yaitu data dan informasi yang diperoleh akan lebih komprehensif, *valid*, *reliable* dan objektif.

Metode Pengumpulan Data

1. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Tujuan umum dari FGD adalah untuk menyamakan setiap persepsi atau suatu isu maupun topik tertentu terkait koperasi. Selanjutnya dari FGD akan melahirkan kesepakatan dan pengertian baru terkait isu yang sedang dibahas. Para peserta FGD terkait perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Maros terdiri dari OPD Pemerintahan Kabupaten Maros yang terkait dengan tema penelitian, Pelaku Koperasi.

2. Wawancara

wawancara merupakan percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan fokus kajian/pelaku dan Pengurus Koperasi dan UMKM.

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang patut Anda pahami jika ingin melakukan penelitian terhadap suatu objek. Teknik ini dapat membantu Anda mengumpulkan berbagai data primer atau informasi penting untuk tujuan tertentu. Kelebihannya, metode observasi diketahui bersifat faktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Observasi/pengamatan dilakukan pada pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Maros.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan proses analisis data dengan beberapa tahapan atau langkah.

1. Transkripsi (Wawancara dan FGD)

Pada tahapan transkripsi (wawancara dan FGD) maka akan diperoleh data primer terkait permasalahan sampai kepada solusi terkait Koperasi dan UMKM di Kabupaten Maros. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui yang terdiri dari timing atau waktu, *weighting* atau bobot, mixing atau pencampuran, dan theorizing atau teorisasi. Masing-masing memiliki peran tersendiri dalam memberikan hasil penelitian yang terukur dengan data campuran agar sesuai dengan tujuan.

2. Kategorisasi berdasarkan tema

Kategorisasi berdasarkan tema merupakan hasil kelanjutan dari tahapan transkripsi. Data dan informasi yang diperoleh secara primer dan sekunder selanjutnya dikategorikan sesuai dengan tema masing-masing masalah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menfokuskan kepada kajian masalah untuk melahirkan solusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maros Smart City

Dalam proses pembangunan *Smart City*, Kabupaten Maros melakukan berbagai persiapan untuk mewujudkan *Maros Smart City*. Agar mendapatkan gambaran tentang kesiapan daerah, maka dilakukan analisis kesiapan *Smart City* untuk Kabupaten Maros dalam melakukan pembangunan daerah dengan pendekatan *smart city*. Tiga komponen utama yang menjadi pilar dalam analisis kesiapan daerah adalah kesiapan struktur, infrastruktur dan superstruktur. *Smart City* didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. (Caragliu, , dkk dalam Schaffers, 2010)

Kota yang cerdas merupakan gambaran umum dari suatu daerah yang memiliki berbagai inovasi dalam segala aspek agar menjadi daerah yang layak dan nyaman huni. Oleh karena itu, terdapat enam dimensi yang menjadi acuan dalam pengembangan *smart city* di Kabupaten Maros. Dimensi *Smart City* yang menjadi aspek perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*Smart Governance*), permukiman penduduk (*Smart Living*), lingkungan masyarakat (*Smart Society*), pertumbuhan ekonomi (*Smart Economy*), citra kota/daerah (*Smart Branding*), dan pemeliharaan lingkungan (*Smart Environment*). Masing-masing dimensi memiliki sub-dimensi yang lebih rinci untuk menentukan indikator keberhasilannya.

Selain kesiapan daerah, tingkat kematangan *smart city* juga dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam perancangan program *smart city*. Kematangan *smart city* dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu initial yang merupakan tingkat awal dalam proses pembangunan *smart city*; *developing* artinya suatu daerah sudah mengembangkan berbagai program pembangunan berbasis *Smart City* dan memiliki dukungan *Smart City Readiness* yang cukup baik managed berarti secara umum suatu daerah telah berada pada tingkat pelaksanaan *smart city* dengan baik pada berbagai aspek dengan dukungan *readiness* yang sangat baik pula serta *optimized* yang berarti tingkat penyempurnaan pembangunan program *smart city* pada berbagai elemen, dimensi, dan aspek.

1. *Smart Governance*

Sasaran : Mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Sub-dimensi *Smart Governance*:

a. Pelayanan Publik

1. Pelayanan administrasi kepada masyarakat yang meliputi: status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang;
2. Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya: sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain; dan
3. Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya: jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

b. Manajemen Birokrasi yang Efisien

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, bertanggungjawab dan keterbukaan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam sub-dimensi ini seperti sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, dan beberapa kegiatan lainnya yang dapat menyederhanakan sistem birokrasi pada suatu daerah. Pengembangan aplikasi *e-gov* harus diarahkan menuju *integrated & inter-operability e-gov* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan *Smart e-Gov*. Pelayanan *Smart e-Gov* ini perlu didukung dengan sebuah "*City Operation Center (COC)*".

c. Efisiensi Kebijakan Publik.

1. Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan; dan
2. Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Melalui dua indikator tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan daerah yang diambil oleh pemerintah.

Smart governance merupakan penggunaan teknologi dan inovasi untuk memfasilitasi dan mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik dalam badan pemerintahan. Pembangunan tata kelola pemerintahan ini sering dikaitkan dengan peningkatan proses demokrasi dan mengubah cara pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi. *Smart governance* juga berperan dalam memastikan lingkungan yang kolaboratif, transparan, partisipatif, berbasis komunikasi dan berkelanjutan bagi warga negara dan pemerintah. Dengan kata lain, *smart governance* berbicara tentang efisiensi layanan publik kota pintar dan peningkatannya melalui inovasi tanpa melupakan inklusivitas demokratis penghuninya.

2. Smart Branding

Sasaran : Meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah daerah dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sub-dimensi *Smart Branding*. *Smart Branding* merupakan sebuah inovasi dalam memasarkan suatu daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing, serta mampu menarik partisipasi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah, pelaku bisnis, dan investor untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tersebut. Branding ini bukan hanya semata untuk membuat suatu kota menjadi terkenal tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu, *smart branding* juga bertujuan untuk mewujudkan penataan wajah Daerah melalui optimalisasi sumber daya yang berpotensi sebagai *brand value* daerah.

3. Smart Economy

Sasaran : Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *cashless society*. *Smart Economy* adalah ekonomi yang berbasis pada inovasi teknologi, efisiensi sumber daya, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial yang tinggi. *Smart Economy* mengadopsi inovasi, inisiatif kewirausahaan baru, meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan tujuan keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup

semua masyarakat. Lebih jauh lagi, *smart economy* bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang dapat memenuhi tantangan di era digitalisasi dan menghasilkan lebih banyak produk maupun layanan dengan lebih sedikit energi dan polusi, serta menciptakan manfaat sosial.

4. *Smart Living*

Sasaran : Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Sub-dimensi *Smart Living*:

a. **Harmonisasi Tata Ruang Wilayah**

Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*).

b. **Sarana Prasarana Kesehatan**

Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (*healthcare*), akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

c. **Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi**

Transportasi merupakan aspek terpenting dalam proses distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, sub-dimensi ini merupakan pilar penting yang memiliki indikator untuk mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

5. *Smart Society*

Sasaran : Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Sub-dimensi *Smart Society*:

a. **Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien**

1. Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun *virtual (digital)* dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan *Smart City* misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.
2. Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang *marketplace* dan program lainnya yang mendukung terciptanya iklim positif di antara masyarakat.

b. **Ekosistem Belajar yang Efisien**

1. Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat penyandang disabilitas; dan
2. Membangun *platform* edukasi bagi masyarakat misalnya *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training program* dan program pembelajaran lainnya.

c. **Sistem Keamanan yang Mampu Melindungi Masyarakat**

Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan

keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing* (IoT)

6. Smart Environment

Sasaran: Mewujudkan pembangunan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Sub-dimensi Smart Environment: *Smart environment* merupakan pembangunan lingkungan hidup yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan. Lingkungan hidup yang cerdas diartikan juga sebagai lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata, serta ruang hijau terbuka yang stabil. *Smart environmen* menekankan pada lingkungan hidup yang berkelanjutan, artinya pengelolaan sumber daya dan pelestarian lingkungan manfaatnya bisa dinikmati untuk generasi sekarang hingga mendatang. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa hampir 50% penduduk dunia akan memadati kota (Senate Department for Urban Development and the Environment, 2015; (Chourabi,et.al.,2012,. Dalam Jhonata Falah, 2019). Artinya, bahwa ketika pemerintah dan masyarakat tidak melakukan pembenahan dalam pengelolaan sumber daya dalam kehidupan bermasyarakat maka akan menimbulkan banyak masalah, penelitian lain yang telah diuraikan bagaimana *Smart City* menjadi kebutuhan bagi setiap negara atau daerah bahkan menjadi kebutuhan secara individu dan masyarakat agar alam semesta yang kita diami saat ini tetap menjadi tempat yang nyaman, aman serta memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia ini sangat sejalan dengan hasil penelitian bahwa Kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, sehingga warga kota merasakan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan tinggal di kotanya harus dipenuhi oleh pengelola kota (Neirottia, et.all., 2014; Nam and Pardo, 2011; Washburn and Sindhu, 2010).

Setiap daerah atau negara bisa mempunyai masalah yang terus datang pada pembenahan ruangnya dari waktu ke waktu. Masalah yang terjadi juga biasanya karena perkembangan negara atau daerah itu sendiri. Untuk menghindari hal itu, sebaiknya diperlukan pengelolaan daerah atau kota dengan pendekatan rancangan perencanaan yang berkelanjutan. penelitian yang dilakukan oleh Mursalim (2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan *Smart City* Di Kota Bandung. Hasil penelitain menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai *smart city* yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparaturnya mengenai smart city dan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada Roadmap Walikota Bandung. penelitian yang dilakukan oleh Yaulie, Billie, dan Stanley (2017) dengan judul “Analisa Kesiapan Kota Cerdas (Studi Kasus: Pemerintah Kota Manado). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Manado telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup siap untuk menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi menuju kota cerdas

HASIL

Pengembangan *smart city* di Kabupaten Maros tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen perencanaan ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal jika tidak saling menopang satu sama lain. Dokumen perencanaan mewujudkan *smart city* Kabupaten Maros merupakan turunan dari visi dan misi daerah dalam menentukan rencana aksi dan inovasi kegiatan. Hal ini tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan,

dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Maros agar pengembangan *smart city* dapat direalisasikan.

RPJMD Kabupaten Maros 2021 merupakan rencana induk pembangunan daerah yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, implementasi dari keenam dimensi *smart city* harus bernaung pada program dan kegiatan yang dirancang di RPJMD. Selain itu, renstra OPD di Kabupaten Maros juga menjadi ujung tombak dalam teknis pelaksanaan *smart city*.

Pada tahap akhir dari implementasi *smart city*, terdapat empat diferensiasi dalam pelaksanaan rencana aksi. Pertama, rencana aksi kebijakan, rencana aksi ini terkait regulasi atau dasar hukum yang diperlukan dalam upaya implementasi *smart city*. Yang kedua, terkait rencana aksi infrastruktur yang mencanangkan sarana dan prasarana fisik yang perlu dibangun atau dikembangkan pada proses pengembangan *smart city*. Ketiga, rencana aksi aplikasi, yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur digital seperti web, aplikasi, atau sistem lainnya untuk mendukung program kota cerdas. Rencana aksi yang terakhir, yaitu, literasi. Rencana aksi ini menjadi bagian vital dalam pengembangan *smart city*. Sebaik apapun inisiasi dan inovasi yang ada, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat hal tersebut belum menjadi kebijakan yang membangun dan akhirnya program akan mati suri. Dengan demikian, imbauan pada masyarakat merupakan salah satu elemen terpenting dalam pengembangan *smart city*.

KESIMPULAN

1. Kabupaten Maros dalam mewujudkan sebagai Smart City maka beberapa dimensi yang perlu dilakukan sebagai aspek perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*Smart Governance*), permukiman penduduk (*Smart Living*), lingkungan masyarakat (*Smart Society*), pertumbuhan ekonomi (*Smart Economy*), citra kota/daerah (*Smart Branding*), dan pemeliharaan lingkungan (*Smart Environment*). Masing-masing dimensi memiliki sub-dimensi yang lebih rinci untuk menentukan indikator keberhasilannya.
2. Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan *Smart City* (Kota Cerdas) merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Maros, "Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing.
3. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan *Smart City* (Kota Cerdas), semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan persoalan Tehnologi, Informasi dan Komunikasi dalam rangka mempercepat dan mendukung pembangunan daerah.
4. Secara filosofis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan *Smart City* (Kota Cerdas) dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan demi mewujudkan kepentingan rakyatnya.
5. Secara Yuridis, dengan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan *Smart City* (Kota Cerdas) ini maka akan semakin memperjelas pengaturan tentang Penyelenggaraan *Smart City* (Kota Cerdas) di Kabupaten Maros yang disesuaikan dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya.

REFERENSI

Appe, Juma'in. 2020. Panduan Indeks Daya Saing Daerah 2020.



- Bitjoli, Billie E., Yaulie D. Y. Rindengan, dan Stanley D. S. Karouw. 2017. "Analisa Kesiapan Jhonata Falah, 2019. Sebaran Keruangan Dan Respon Warga Kota Terhadap Layanan Smart Living Menuju Semarang Smart City Tahun 2018.
- Kota Cerdas (Studi Kasus: Pemerintah Kota Manado)." Jurnal Teknik Informatika 12(1).
- Hizra Marisa dan Andree Analisa Implementasi Smart City Madani Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Sinergitas Program Asean Smart Cities Network (ascn) 2023.
- I Putu Agus Eka Pratama, Sistem Informasi Dan Implementasinya, 1st Ed. Bandung: Informatika Bandung, 2014.
- Kurnia Novianti Dan Choerunisa Noor Syahid Menuju Kota Cerdas: Pelajaran Dari Konsep *Smart City* Yang Diterapkan Di Jakarta Dan Surabaya, 2016. Jurnal.
- Mursalim, Siti Widharetno. 2017. "Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung Siti Widharetno Mursalim." Jurnal Ilmu Administrasi 14: 126-38.
- Neirottia, Paolo, et.al. 2014. "Current trends in Smart City initiatives: some stylized facts". *CITIES*, Vol. 38, pp. 25-36.
- Nukma, usman, 2016. Makassar *Smart City* solusi sebuah kota maju, Makassar: pelita Pustaka.
- Prasetyo, A. (2020). Komparasi Proses Inovasi Dalam Perspektif Kebijakan Pemerintah Daerah dan Daya Saing Daerah. Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers, March 2020, 308-325.
- Putri, O. H., & Rahayu, S. (2021). Analisis Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah. Jurnal Akrib Juara, 6(4), 147-153.
- Ridwan, Hasanuddin, B., Amri, M., & Madris. 2018. Analisis Daya Saing Daerah di Indonesias. Siti Widharetno Mursalim, implementasi kebijakan *Smart City* di kota bandung, Vol 14, NO 1 Tahun 2017, h 126.
- Swastuti, E., & Pudjiarti, E. S. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Mendukung Daya Saing Daerah Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 25-40.
- Wibowo. (2017). Rebranding Desa Wisata Kembang Arum Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Bidang Pariwisata. Jurnal Dekade, 10(1), 61-72.

Internet

Caragliu, A., dkk dalam Schaffers, (2010) https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_cerdas.

Peraturan Perundang-Undang

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.